

**POLITIK EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN SOEHARTO
TAHUN 1969-1989 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ENI MARTANINGRUM

NIM: 09370081

PEMBIMBING:

DR. H. KAMSI., M.A.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Perekonomian sangat dominan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto hingga mengakar mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kekuasaan pada masa Orde Baru. Pada era Orde Baru lebih menitikberatkan pada politik pembangunan yang mencakup seluruh sendi kehidupan masyarakat, terutama pembangunan di sektor ekonomi. Mind set tentang *developmentalisme*, selain mengantarkan Soeharto pada masa keemasan juga Orde Baru dapat memerintah selama 32 tahun lamanya, sebagai alat legitimasi atas sikap militer. Bahwa, stabilitas politik merupakan persyaratan dalam menjalankan roda pembangunan ekonomi.

Dalam melakukan politik ekonomi, Orde Baru melakukan pembangunan ekonomi dengan beberapa tahapan Pembangunan Lima Tahun (PELITA) dilaksanakan semenjak awal Soeharto menjabat sebagai presiden. Lebih lanjut, karena penelitian ini mengkaji masalah politik ekonomi untuk mencapai kekuasaan negara maka penyusun mengkategorikannya dalam perspektif *Fiqh as-Siyasah* atau *as-Siyasah as-Syar'iyah*. *As-Siyasah as-Syar'iyah* ialah wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya *kemaslahatan* dan terhindar dari *kemadlaratan* berlandaskan pada *Maslahah al-Mursalah* (kepentingan umum). Dalam pandangan *siyasah maliyah* ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang didasarkan pada data tertulis, baik yang berasal dari buku, jurnal, maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian. Dalam penelitian penyusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.

Politik ekonomi Soeharto dilaksanakan melalui Pembangunan Lima Tahun, Peningkatkan investor bantuan dan Penanaman Modal Asing (PMA) dan penghentian inflasi sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah* dapat mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Sehingga dapat dikatakan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintahan Soeharto sesuai dengan *prinsip-prinsip fiqh siyasah yaitu terhadap nilai As-syura* (musyawarah), *Al-Musawah* (kesetaraan), *Al-adalah* (Keadilan), *Al-hūriyyah* (kebebasan), dan *Al-amanat* (responbility). Karena dalam program pembangunan yang dilakukan sejalan dengan ideologi ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan agar terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat sehingga terciptanya kemakmuran di negara Indonesia.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: : Eni Martaningrum
NIM: : 09370081
Judul: : **POLITIK EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN
SOEHARTO TAHUN 1969-1989 PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Mei 2013

Dr. H. Kamsi., M.A
NIP. 19570207 198703 1 003



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Eni Martaningrum
NIM :09370081
Jurusan :Jinayah Siyasah
Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Juni 2013
Yang menyatakan



Eni Martaningrum
NIM 09370081



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/208.a/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **POLITIK EKONOMI PADA MASA
PEMERINTAHAN SOEHARTO TAHUN
1969-1989 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Eni Martaningrum
NIM : 09370081
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Juni 2013
Dengan Nilai : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji I

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji II

Dr. Ahmad Patirov, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 001

Yogyakarta, 11 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Kamsi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan
(Al-Alaq (96)-1)*

Hidup adalah perjuangan dan jangan menyerah

Dapat berkontribusi untuk keluarga, bangsa dan negara itu sudah cukup bagiku

Lebih baik bermental tempe daripada bermental kentucky

PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tuaku

Ayahanda Teguh Ruswanto dan Ibunda Sukirni

Yang hingga detik ini ketika kutulis sebuah persembahan indah nan bersahaja

Masih senantiasa menata sepuluh jarinya

Untuk selalu mendoakanku, dan memberi sebuah ketiadaan manjadi sebuah keadaan,

Kasih yang tak terbatas yang selalu jadi motivasi selama ini.

Untuk kedua adikku Iwan Budi Pratomo dan Danang Tri Utomo

Terimakasih untuk selama ini yang senantiasa menjadi obor semangat

Tatkala semangatku mulai pudar.

Keluarga besar Ayah dan ibuku yang selalu mensupportku,

Fatwa Rizky Ananda yang telah membantuku selama ini,

Sahabatku Lailatul Marhumah yang selalu ada dalam suka dan duka, dan

Almamaterku: Kampus Putih Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bä'	b	be
ت	Tä'	t	te
ث	Šä'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥä'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khä'	kh	ka dan ha
د	Däl	d	de
ذ	Žäl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rä'	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ḡukira</i>

يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "f"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawr al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mampu memberikan suri tauladan bagi umatnya sehingga kita mampu terlepas dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur *alhamdulillah*, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang **POLITIK EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN SOEHARTO TAHUN 1969-1989 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak berlalu begitu saja tanpa adanya do'a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

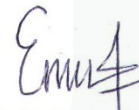
2. Noorhaidi, S.Ag, M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. H. Kamsi., M.A. selaku WD I dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Muhammad Nur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Teguh Ruswanto dan Ibunda Sukirni, yang tiada henti selalu memberi motivasi Ananda untuk melangkah maju dan yang selalu mencurahkan do'a, kasih sayang dan cintanya hingga tak terbatas, yang senantiasa meng'ada'kan sebuah ke'tiada'an. Mungkin sampai habis kata-kata di dunia ini, belum cukup untuk mengungkapkan segenap perasaan sayang dan terimakasih Ananda untuk Ayah dan Ibu.
7. Adikku Iwan Budi Pratomo dan Danang Tri Utomo yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril, terimakasih untuk semuanya.
8. Fatwa Rizky Ananda yang telah memotivasi dan membantuku dalam pembuatan skripsi.
9. Sahabatku Lailatul Marhumah selalu ada untukku baik suka atau duka.

10. Tika Listiami, Didik Harianto, Muhammad Abiri Sabil, Tri Sangadah, Siti Maimunah, Siti Nur Anisa Amalia yang telah mendukung pembuatan skripsi dan teman-teman JS angkatan 09 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 03 Juni 2013

Penyusun



Eni Martaningrum

09370081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERYATAAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. POLITIK EKONOMI PADA MASA PEMERINTAH SOEHARTO	

A. Gambaran Umum Politik Ekonomi Orde Lama dan Orde Baru	
1. Politik Ekonomi Orde Lama Demokrasi Terpimpin	21
2. Politik Ekonomi Orde Baru Demokrasi Pancasila	30
B. Politik Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Soeharto	
Tahun 1969 sampai 1989	47
1. Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I sampai IV Masa Pemerintahan Soeharto.....	47
2. Peningkatan investor Bantuan dan Penanaman Modal Asing...64	
3. Menghentikan Inflasi.....	67
 BAB III POLITIK EKONOMI DAN FIQH SIYASAH	
A. Kebijakan Politik ekonomi pemerintahan Soeharto tahun 1969-1989 perspektif Fiqh Siyasa.....	68
 BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	83
 DAFTAR PUSTAKA	86
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Datar Terjemahan	I
Biografi Ulama	III
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1969-1989	VIII
Curriculum vitae	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Lengsernya Ir. Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia (R.I) pertama, diakibatkan oleh ketidakstabilan politik Indonesia mencapai puncak dengan terjadinya kudeta yang gagal pada akhir September 1965 membawa perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia. Sejak saat itu, sistem ekonomi yang dianut Indonesia mengalami perubahan dari pemikiran sosialis ke semi kapitalis, dalam pelaksanaannya mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin besar. Hal tersebut menjadi peluang bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dengan memanfaatkan situasi politik dan ekonomi yang sedang bergejolak di Indonesia. Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Soeharto ditandai dengan adanya sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikepung oleh demonstrasi mahasiswa. Perebutan kekuasaan ini memuncak ketika Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR).¹ Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966.² Pimpinan Angkatan Darat menerima Surat Perintah dari Presiden Soekarno, yang *de facto* menyerahkan

¹ Mohtar Mas' oed. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 57.

² Marwati Djoened Poesponegoro dan Notosusanto Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, cet. Ke 4, (Jakarta; Balai Pustaka, 1984), hlm. 425.

kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Ini benar-benar prestasi besar dalam upaya mencari keabsahan bagi kegiatan politik Angkatan Darat. Dokumen legal penting itu memberikan kekuasaan sah pada pimpinan Angkatan Darat. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Soeharto dapat membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta memenjarakan para politisi dan beberapa menteri yang diduga terlibat dalam Gerakan September tiga puluh (GESTAPU) maupun para pendukung Orde Lama yang lain. Semenjak menjabat menjadi presiden Republik Indonesia kurang lebih selama 32 tahun (1966 – 1998), Jendral Soeharto telah meninggalkan sejarah bagi bangsa Indonesia. Jargon-jargon politik yang diterjemahkan melalui sendi-sendi kehidupan masyarakat semakin mewarnai langgam politik Indonesia. Namun, sekuat dan sehebat apapun kekuatan politik Soeharto dalam mengendalikan kekuasaan negara akhirnya runtuh pula.

Lambat laun, sistem yang diciptakan pada masa Orde Baru mulai rapuh dan menjadi bom waktu bagi Soeharto sendiri. Kejatuhan Soeharto merupakan hasil dari meningkatnya gerakan oposisi dari bawah. Friksi internal elit mulai merusak keutuhan oligarki kekuasaan diakhir 1980-an.³ Pada proses berikutnya, oligarki kekuasaan juga mulai terbelah dengan adanya batasan aktivitas politik yang mendasari pengunduran Soeharto, semua dapat disimpulkan karena krisis legitimasi sebagai konsekuensi yang diterima. Era Soeharto, disebut sebagai era Orde Baru sejak tahun 1968, dibangun atas dasar mekanisme *carrot and stick*.⁴

³ Hiariej Eric, *Materialisme-Sejarah Kejatuhan Soeharto, Pertumbuhan dan Kebangkitan Kapitalisme Orde Baru*, cet. I (Yogyakarta: IRE Press, 2005), Hlm. 293.

⁴ Gaffar Affan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, cet. Ke-IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 148.

Yakni, Pemberdayaan atas lembaga-lembaga negara untuk menciptakan stabilitas politik nasional. Soeharto juga memaksa depolitisasi terhadap masyarakat untuk membangun perekonomian yang kokoh. Maka ketika para penguasa Orde Baru mengukuhkan diri sebagai penentu langkah kehidupan Indonesia yang penuh dengan rekayasa sejak 1966, maka politik adalah suatu yang dikecam dan diharamkan. Satu alternative dari penguasa Orde Baru adalah depolitisasi terhadap masyarakat. Orde Baru mempunyai sifat kepemimpinan mirip dengan *Otoriterisme Birokratik* dan *Korporatisme - Negara* yang dikemukakan oleh Guillermo O'Donnel dan Philippe Schmitter.⁵

Keberhasilan yang diraih pada rezim Orde Baru tidak terlepas dari tiga jalur yang dikenal jalur ABG (ABRI (sebagai posisi sentral), Birokrasi dan Golongan Karya (Golkar)). Ke tiga jalur tersebut membantu Jendral Soeharto untuk memimpin negara Indonesia dalam bidang administrasi maupun bidang pertahanan dan keamanan sedangkan didalam birokrasi Politik *floating-mass* (masa mengambang) menjadikan birokrasi dapat menjangkau ke seluruh wilayah pelosok desa-desa di tanah air kita ini.

Perekonomian sangat dominan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto hingga mengakar mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kekuasaan pada masa Orde Baru. Pada era Orde Baru lebih menitikberatkan pada politik pembangunan yang mencangkup seluruh sendi kehidupan masyarakat, terutama pembangunan di sektor ekonomi. Mind set tentang *developmentalisme*,

⁵ Mohtar Mas' oed, *Ekonomi dan struktur politik Orde Baru, 1966 – 1971*, hlm.6-7.

selain mengantarkan Soeharto pada keemasan juga Orde Baru dapat memerintah selama 32 tahun lamanya, sebagai alat legitimasi atas sikap militer. Bahwa, stabilitas politik merupakan persyaratan dalam menjalankan roda pembangunan ekonomi.⁶ Masa pemerintahan Soeharto terdapat pembangunan jangka panjang dengan rentan waktu 25 sampai 30 tahun dan Pembangunan jangka pendek dengan kurun waktu lima tahun yang biasa disebut dengan Pembangunan Lima Tahun (PELITA).

Pembangunan Lima Tahun dapat mempengaruhi Kestabilan ekonomi dan keamanan nasional sehingga dapat meraih puncak kekuasaan. Penyusun akan mengkaji tema tersebut (Politik ekonomi sebagai penguasaan pemerintah) dari kacamata *fiqih siyasah* dengan mengambil pandangan para pemikir Islam klasik maupun modern yang telah memunculkan gagasan-gagasan baru sesuai dengan alam politik berkembang. Diantaranya ialah, al-Mawardi, al-Maududi, Ibnu Taimiyah, Fazlur Rahman dan pemikiran islam lainnya, yang mencoba memberikan perhatian dalam hal kekuasaan kepala pemerintahan (politik) dalam Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disaksikan betapa besarnya peranan politik dan ekonomi terhadap sebuah kekuasaan seorang penguasa Negara. Politik ekonomi tidak dapat dipisahkan terhadap kekuasaan, ekonomi yang menyangkut fenomena kekayaan sedangkan politik yang berurusan dengan fenomena kekuasaan diikat oleh hubungan saling mempengaruhi. Di satu pihak, politik

⁶ Honna Jun, *Serdadu Memburu Hantu: Ideologi Kewaspadaan disenjaka Kekuasaan Orde Baru*, cet.I (Yogyakarta: CIA ,2006), hlm.5.

umumnya menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkan kearah tertentu demi memenuhi kepentingan kelompok yang dominan. Artinya, penerapan kekuasaan segala bentuknya merupakan faktor penting yang menentukan sifat suatu sistem ekonomi. Di lain pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Artinya, proses itu bisa mengubah hubungan kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya ini akan menyebabkan perubahan sistem politik, dengan demikian memunculkan suatu struktur hubungan ekonomi baru. Dalam pengertian ini, hubungan antara politik dan ekonomi, yang di sini diterjemahkan ke dalam efek antara hubungan kekuasaan dengan kekayaan, harus menjadi bagian integral dari analisa politik yang memusatkan perhatian pada fenomena perubahan.

Penekanan pada hubungan antara ekonomi dan politik, yang disebut pendekatan ekonomi politik, juga berkaitan erat dengan analisa yang menekankan peranan negara yang aktif dan otonom. Menurut Charles Kindleberger, ekonomi dan politik adalah dua metode yang berbeda untuk mengalokasikan sumber daya langka, ekonomi melalui mekanisme pasar, sedang politik melalui mekanisme anggaran belanja negara. Jadi seorang kepala pemerintah dituntut dalam menggunakan kekuasaannya untuk memecahkan persoalan-persoalan kenegaraan yang memang selalu berkembang. Meskipun demikian pemecahan-pemecahan terhadap masalah tersebut (melalui ijtihad) tidak boleh bertentangan dengan *al-Qur'an* dan *al-hadis*.

Melihat sekelumit peristiwa kekuasaan pada masa Orde Baru penulis merasa tertarik dengan judul “ Politik Ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto

Tahun 1969-1989 perspektif fiqh siyasah". Penulis menyoroti pada kebijakan ekonomi yang menggunakan ideologi pancasila hingga mengakar di berbagai sektor masyarakat yang dilakukan pada era Soeharto, dengan diawali pada tahun 1969 karena dimulainya proses pembangunan yang direalisasikan melalui PELITA (Pembangunan Lima Tahun) hingga mencapai puncak keemasan. Kemudian penyusun menjelaskan lebih lanjut dari sisi yang berbeda dengan mengambil pokok-pokok masalahnya yaitu bagaimana perspektif *fiqh siyâsah* melihat kekuasaan kepala pemerintah yang dibangun era Soeharto dengan sistem politik ekonomi menggunakan ideologi pancasila yang menjadi salah satu acuannya. Menurut al-mawardi *kekhalifahan* bukan semata-mata institusi keagamaan yang menciptakan keadilan, namun juga organisasi sosial terbesar untuk membantu memajukan kehidupan ekonomi manusia dimuka bumi.

Berawal dari paparan praktik politik Orde Baru yang menekankan kepada ekonomi, Pembahasan skripsi ini menitik beratkan pada strategi politik ekonomi ideologi pancasila yang berpengaruh terhadap penguasaan negara oleh presiden ke dua yang memimpin Negara Republik Indonesia dengan perspektif *fiqh siyâsah*.

B. Pokok Masalah

Kajian politik ekonomi Orde Baru terhadap penguasaan sebuah negara menurut perspektif fiqh siyasah pada dasarnya berkaitan dengan dua permasalahan pokok, kebijakan politik ekonomi Orde Baru dalam pemerintahan penguasaan negara dan pandangan *fiqh siyâsah* terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka pokok masalah skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana politik ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto tahun (1969-1989) dalam pandangan Fikih Siyasa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan diatas, tujuan studi ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan realitas obyektif tentang kebijakan politik ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto terhadap kekuasaan.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis keilmuan

Studi ini, diharapkan dapat mendeskripsikan dan menjelaskan realitas obyektif tentang kebijakan politik ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto terhadap kekuasaan.

b. Secara pragmatis

Studi ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua dalam mengkaji kebijakan-kebijakan politik ekonomi dalam sistem kekuasaan.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian tentang Soeharto banyak ditemui diberbagai literatur yang membahas berbagai permasalahannya, Politik ekonomi pada masa pemerintahan

Soeharto tahun 1969-1989 perspektif Fiqh Siyasah, dan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki sesuai dengan topik permasalahan, penyusun tidak melepaskan diri dari hasil penelitian para peneliti terdahulu sebagai pendukungnya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa karya para peneliti:

1. Buku yang ditulis oleh Mochtar Mas' oed, " *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*" ⁷ dalam buku ini dibahas tentang masa pembentukan awal Orde Baru beserta struktur politik dan lembaga yang muncul bersamaan dengannya. Dia memberikan penekanan pada hubungan antara kapital internasional dan penguasa militer, intelektual, dan ideologi di Indonesia yang mendukung pembangunan bercorak kapitalis.
2. Skripsi disusun oleh Warnoto berjudul *Politik Hukum Islam (studi Komparasi era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi)*. berkaitan dengan perjalanan konfigurasi politik yang ditampilkan oleh Orde Lama, Orde baru, dan Era Reformasi (dengan melihat bekerjanya pilar-pilar demokrasi dan memperhatikan hubungan islam dan negara). Konfigurasi politik masing-masing periode senantiasa akan berpengaruh terhadap sifat atau karakter produk hukum Islam yang dihasilkan. Sebab itu posisi

⁷ Mas' oed Mochtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES , 1989).

dan fungsi hukum Islam di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional sangat terpengaruh atas politik hukum Islam tersebut.⁸

3. Skripsi yang berjudul Kebijakan Politik Orde Baru tentang Fusi (penyempitan) Parpol Perspektif Hukum Islam karya Pujiyono menjelaskan penyederhanaan jumlah partai politik untuk menstabilkan kondisi politik karena adanya ketidakstabilan politik waktu itu menurut paradigma Orde Baru adalah kesalahan sistem kepartaian.⁹

E. Kerangka Teoritik

Secara teoritis, kebijakan pemerintah Orde Baru merupakan suatu langkah yang konkrit untuk menstabilkan politik. Dalam upaya menstabilkan politik pada prinsipnya berkaitan erat dengan paradigma yang dianutnya. Berdasarkan paradigma yang dianut maka konstruksi paradigma yang dipakai oleh pemerintah Orde Baru digunakan untuk memahami realitas politik ekonomi dan kekuasaan sesuai dengan sistem politik yang ideal.

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani "*Polis*" yang artinya sama dengan kota (*City*) atau negara kota (*City State*) dari polis timbul istilah lain "*Polite*" artinya warga negara, "*Politicos*" artinya kewarganegaraan, "*Politike Technen*" artinya kemahiran berpolitik, dan selanjutnya orang-orang Romawi

⁸ Warnoto, *Politik Hukum Islam (studi Komparasi era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

⁹ Pujiyono, *Kebijakan Politik Orde Baru tentang Fusi (penyempitan) Parpol Perspektif Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

mengambil istilah tersebut serta menamakan pengetahuan tentang negara itu sebagai kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan¹⁰.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.¹¹

Konsepsi politik cenderung mengaitkan politik dengan negara, yakni dengan urusan pemerintah pusat maupun daerah. Dari asumsi ini penulis menyimpulkan hakikat politik adalah kegiatan yang berada sekitar institusi politik yang dimanifestasikan oleh aktor-aktor politik, seperti tokoh-tokoh pemerintah yang ada pada tingkatan eksekutif maupun legislatif. Namun, secara empirik hakikat politik bermakna bahwa politik adalah segala aktifitas yang berhubungan dengan kekuasaan dengan tujuan untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah dan mempertahankan suatu bentuk dan tatanan sosial masyarakat.

Menurut pemerintahan Orde Baru sistem politik yang ideal adalah sistem kekuasaan yang berorientasi kepada program bukan ideologi sehingga dicanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) kemudian direalisasikan setelah pemilu dan terpilih menjadi presiden. Dengan demikian untuk mewujudkan situasi politik yang stabil, situasi ekonomi yang

¹⁰ <http://definisiimu.blogspot.com/2012/10/definisi-politik.html>(diakses 20 februari 2013).

¹¹ Ardial, *Komunikasi Politik*, cet II (Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media, 2010) hlm.23.

stabil dan dan kesejahteraan rakyat maka Orde Baru melakukan kebijakan politik berupa politik ekonomi dengan menggunakan ideologi pancasila. Dengan kebijakan ekonomi berideologi pancasila ini diharapkan kebijakan politik akan tercapai.

Kepala pemerintahan dalam kajian *fiqh siyâsah* disebut juga *khalifah*, secara *etimologis* kata *khalifah* berasal dari kata dasar atau masdar dari *fi'il madly kholafa*, yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya sedang bentuk jamaknya *khulafa khala'if* yang mempunyai arti primer “pengganti” yaitu seseorang yang menggantikan tempat dalam beberapa persoalan.¹²

Kepala pemerintah dalam *terminologi* disebutkan *khalifah*, imam dan amir, pada dasarnya merupakan sebutan atau gelar bagi seseorang yang melaksanakan fungsi kekhalifahan keimaman, dan keamiran dalam sejarah Islam.¹³ Menurut Imam al-mawardi ketika kepala pemerintahan telah menunaikan wewenangnya berarti ia telah menunaikan hak-hak Allah, ketika itu ia memiliki dua hak atas rakyat yaitu hak ketaatan dan hak dibela, selama imam tidak menyimpang dari garis keimamahan atau selama kepala pemerintahan masih berpegang teguh pada nas-nas syari'at, maka patuh dan taat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap warga. Namun seorang Imam atau kepala

¹² A. Warson Munawir, *kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), hlm.362.

¹³ Dari sebutan tersebut masing-masing berbeda masanya, dengan munculnya dan sebab-sebab yang menimbulkan gelar-gelar tersebut berlainan, namun akhirnya semuanya mengarah kesatu tujuan untuk mencari arti yang sama, yakni sebutan bagi seorang penguasa yang memimpin negara Islam.

pemerintahan telah menyimpang dari amanah hak-hak ummat yang telah diberikan berarti dia harus diturunkan dari jabatannya.¹⁴

Kepala pemerintah sebagai konsekuensi dari kewajiban sebagai pemegang jabatan kekuasaan kepala pemerintahan, seperti yang diketengahkan oleh al-Mawardi, bahwa seorang kepala negara pemerintah mempunyai kekuasaan yang diamanahkan kepadanya dalam mengurus negara, yaitu negara dari malapetaka yang dapat merugikan hidup orang banyak, sehingga dengan demikian segala perbuatan seseorang kepala pemerintahan haruslah membawa kemaslhatan bagi rakyatnya.¹⁵

Dalam melakukan politik ekonomi, Orde Baru melakukan pembangunan ekonomi dengan beberapa tahapan Pembangunan Lima Tahun (PELITA) dilaksanakan semenjak awal Soeharto menjabat sebagai presiden. Lebih lanjut, karena penelitian ini mengkaji masalah politik ekonomi untuk mencapai kekuasaan negara maka penyusun mengkategorikannya dalam perspektif *Fiqh as-Siyasah* atau *as-Siyasah as-Syar'iyah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf definisi *as-Siyasah as-Syar'iyah* ialah wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya *kemaslhatan* dan terhindar dari *kemadaratan*.¹⁶ Dengan demikian siapapun yang ingin membangun pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada *Maslahah al-Mursalah* (kepentingan umum).

¹⁴ Abi Hasan Ali Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, *Al-Ahkam as Sultaniyyah Wa al-Wilayah ad-Dniyyah*, (Beurit: Daral-kutub al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 19.

¹⁵ Al-Mawardi, *al-ahkam as-Sulthaniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Khattani dan Kamaluddin Nurdin, (jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.37-38.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) V : 1626, artikel “Siyasah as-Syar'iyah”.

Dalam pandangan *siyasah mâliyah* ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.¹⁷ Djazuli mengatakan bahwa *siyasah mâliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

Maqāṣid asy-Syari'ah dapat diartikan sebagai 'tujuan-tujuan ajaran Islam' atau dapat juga dipahami sebagai 'tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran atau syari'at Islam. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu:¹⁸ *Maqāṣid Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer) adalah sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi, *Maqāṣid Hajjiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan dan *Maqāṣid Tahsiniyyat* (kemewahan atau tujuan-tujuan tertier), didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan harfiah dan kata *tahsiniyyah*) proses perwujudan kepentingan *daruriyyat* dan *hajjiyyat*.

Secara garis besarnya, landasan konstitusional kepala pemerintah dalam menyelenggarakan proses kehidupan bernegara harus mencerminkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, diantaranya ialah:

¹⁷ A. Djazuali, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah cet.3*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hlm. 177.

¹⁸ Jaser 'Audah, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Penerjemah: 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 8-9.

1. *As-syurā* (musyawarah), dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.¹⁹ Pengambilan keputusan yang dilakukan haruslah mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Landasannya firman Allah SWT yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَنْفِقُونَ²⁰

2. *Al-Musawah* (Persamaan) yaitu pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi kesukuan, ras, agama, jenis kelamin dan kelas sosial.²¹ Landasan mengenai kesetaraan ini disebutkan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²²

3. *Al-adalah* (Keadilan), yaitu menetapkan suatu baik berupa hukum, peraturan, dan kebijakan harus sesuai dengan hakikat kebenaran obyektif

¹⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), hlm. 112.

²⁰ Q.S Asy-Syurā (42): 38

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ "Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, cet. Ke-1, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 190-191.

²² Q.S Al-Hujurat (49):13

tanpa pandangan subyektif. Pelaksanaannya juga harus dilakukan tanpa pandangan keberpihakan.²³ Landasan mengenai keadilan ini disebutkan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى
الْأَ تَعْدَلُوا اءَدْلُوا هُوَ أَ قْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ²⁴

4. *Al-huriyyah* (kebebasan) yaitu, adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang benar, bertanggungjawab dan mencerminkan akhlak yang baik.²⁵ Landasan tentang kebebasan ini disebutkan dalam al-Qur'an:

وَقُلْ اءَعْمَلُوا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ عَمَلِكُمْ وَرِسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسْتَرْدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ²⁶

5. *Al-amanat* (responsibility), yaitu seorang pemimpin pada hakekatnya ia memegang amanat, dan harus dapat melaksanakan serta mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT dan rakyat yang telah memberi kepercayaan padanya. Sebagaimana hadis yang menegaskan:

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, hlm. 189.

²⁴ Q.S Al-Maidah (5): 8.

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, hlm. 197.

²⁶ Q.S At-Taubat (9): 105.

انّ الله يأمركم ان تؤدّوا الامنت الى اهلها واذحكتم بين الناس ان
تحكموا بالعدل انّ الله نعمًا يعظكم به انّ الله كان سميعا بصيرا²⁷

Kelima prinsip ini menjadi dasar terselenggaranya suatu lembaga kepala negara dalam pemerintahan Islam. Aplikasinya dapat dilakukan lewat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan kepala pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam bingkai syari'at Islam.

Sedangkan ekonomi atau perekonomian adalah sistem yang menggambarkan perikehidupan manusia sehari-hari, yang menyangkut usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, dan yang terutama berhubungan dengan masalah pemanfaatan barang-barang material.²⁸ Politik ekonomi adalah tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kemakmuran masyarakat. Titik berat politik ekonomi bukan pada aspek ekonomi, tetapi pada aspek dan proses politik.²⁹ Jadi dapat dikatakan politik ekonomi adalah suatu ilmu kemasyarakatan modern yang membahas hubungan antara proses-proses politik dan ekonomi untuk kepentingan rakyat banyak.³⁰ Ekonomi dilihat dari ideologi pancasila atau yang biasa disebut sistem ekonomi pancasila adalah Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar

²⁷ Q.S An-Nisa' (4): 58.

²⁸ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: gagasan dan kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 31.

²⁹ Didik J. Rachbini, *Ekonomi politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Edisi I, (Jakarta: Granit 2004), hlm. 180.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam sub bab ini perlu penyusun paparkan tentang metode penelitian yang digunakan. Antara lain meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan-pendekatannya dan analisa data.

1. Jenis Penelitian

Kajian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang sistem politik ekonomi yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1969-1989 melalui bahan-bahan material yang terdapat di perpustakaan.³¹ Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara komprehensif guna mencari titik terang dari pokok masalah yang tercantum dalam rumusan masalah.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif-analitis. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta,³² yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1969-1989, yang mempunyai dimensi ruang dan waktu serta menimbulkan jawaban atas pertanyaan apa, bilamana dan dimana. Analitik bersifat menganalisis fakta-fakta, tentang sistem politik ekonomi pada masa

³¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 23.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 51.

pemerintahan Soeharto tahun 1969-1989, tidak hanya sekedar mendeskripsikan atau memaparkan kebijakan pemerintahan Orde Baru tentang politik ekonomi, melainkan juga menganalisis pandangan fiqh *siyâsah* secara kondisional sehingga dapat lebih disimpulkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca dan menelaah karya-karya yang sudah ada. Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pandangan dengan topik yang dikaji, penyusun mengumpulkan data berupa kitab-kitab buku maupun jurnal serta dokumen untuk dikaji sebagai pijakan dalam upaya pemecahan masalah. Secara garis besar sumber data pada penelitian ini dibagi dua, yaitu:

- a) Sumber Primer, yaitu al-Qur'an dan hadis, serta skripsi mahasiswa
- b) Sumber Sekunder, yaitu karya-karya atau dokumen yang berkaitan erat dengan masalah diatas.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis, normatif dan filosofis. Yang dimaksud dengan pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa setiap produk pemikiran itu merupakan hasil interaksi pemikiran dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.³³ Berkaitan dengan penelitian ini politik ekonomi Orde Baru tentang kebijakan ekonomi dipahami dalam konteks realitas sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pengaruh global yang mengitarinya. Kemudian dengan

³³ M. Antho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

pendekatan normatif yang dimaksudkan bahwa kebijakan politik Orde Baru tentang ekonomi dipahami dan dinilai dari perspektif fiqh siyasah. Sedangkan dengan pendekatan filosofis dimaksudkan bahwa masalah dimaksud dipahami dan dinilai dari perspektif *maqāṣid asy-syari'ah* yakni dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kepentingan umum jangka pendek dan jangka panjang.

5. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun dan telah diklasifikasikan secara sistematis, selanjutnya analisis dengan cara saling menghubungkan diantara data-data yang ada untuk kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang relevan. Dalam analisis data ini menggunakan data reflektif yaitu metode analisis data yang menerapkan pola fikir yang bergerak secara bolak-balik antara induksi dan deduksi. Dalam metode reflektif aspek-aspek historis dan normatifitas *Fiqh Siyasah*.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Kesemua bab dimaksud disusun dalam suatu bangunan yang sistematis dan logis.

Bab pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai materi kajian. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi, arah dan tujuan penelitian ini.

Bab kedua memaparkan gambaran umum politik ekonomi Orde Lama dan Orde Baru dan politik ekonomi tahun 1969-1989 pada masa pemerintahan Soeharto.

Bab ketiga memaparkan politik ekonomi dan fikih siyasah yang mencangkup ideologi ekonomi Soeharto, gerakan ekonomi Soeharto dan perilaku ekonomi Soeharto yang kemudian dikaitkan dengan fiqh siyasah.

Bab keempat adalah penutup, kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya, dikemukakan dalam bab ini. Bab terakhir ini ditutup dengan merekomendasikan saran-saran yang dipandang perlu dan relevan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kebijakan ekonomi dilakukan secara bertahap melalui pembangunan Lima Tahun (Pelita), penulis memfokuskan dari Pelita I hingga IV telah mengalami beberapa perubahan dibidang politik dan ekonomi, diantaranya adalah:

1. Bidang ekonomi: terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang, yaitu kemampuan dan kekuatan industri yang maju didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Struktur ekonomi yang seimbang ini dicapai secara bertahap melalui Pelita I sampai Pelita IV.
2. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sosial-budaya: terciptanya kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang selaras baik dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama maupun dengan alam sekitarnya serta memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang sehingga sanggup serta mampu melanjutkan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang.
3. Bidang politik dalam negeri: mantapnya kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi

setiap warga negara sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional, sedangkan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera.

4. Bidang pertahanan keamanan: terciptanya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang mampu menyukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya, pembangunan nasional pada khususnya, dari setiap ancaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Politik ekonomi Soeharto dilaksanakan melalui Pembangunan Lima Tahun, Peningkatan investor bantuan dan Penanaman Modal Asing (PMA) dan penghentian inflasi sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah* dapat mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Sehingga dapat dikatakan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintahan Soeharto sesuai dengan *prinsip-prinsip fiqh siyasah yaitu terhadap nilai As-syura* (musyawarah), *Al-Musawah* (kesetaraan), *Al-adalah* (Keadilan), *Al-huriyyah* (kebebasan), dan *Al-amanat* (responsibility). Karena dalam program pembangunan yang dilakukan sejalan dengan ideologi ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan agar terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat sehingga terciptanya kemakmuran di negara Indonesia.

B. Saran-saran

Penyusun berpendapat bahwa politik ekonomi yang dilakukan Soeharto pada awal kekuasaan dengan melakukan pendekatan ekonomi “berorientasi ke luar” dengan mengikuti sistem ekonomi kapitalis sebaiknya tidak dilakukan karena sistem kapitalis cenderung dengan adanya kesenjangan sosial terutama antara si kaya dengan si miskin, dengan sistem kapitalis maka sangat nampak perbedaan yang sangat mencolok yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. kemudian dengan adanya sistem ekonomi yang bebas maka pihak investor asing atau swasta asing dengan bebas bergerak di Indonesia dengan menanam modal sebanyak-banyak, menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dapat merugikan Indonesia kedepan, yang pada akhirnya meninggalkan hutang dari generasi ke generasi. Berdampak pada anak-anak bangsa yang telah dinanti hutang akibat kesalahan pendahulunya.

Penyusun juga sependapat dengan politik ekonomi Soekarno dengan membentuk Sosialis ala Indonesia, penulis lebih mengarahkan Sosialis ala Pancasila. Penulis memahami Sosialis bukan berarti mengikuti paham komunis yang tidak berdasarkan komunis tetapi lebih mengarah kepada sama rasa sama rata, Kapitalisme dan imperialisme dimaki, kekuatan pasar tidak dipercayai, dan harus diperbaiki atau ditukar dengan perencanaan nasional dan pengawasan langsung pemerintah, pemilikan usaha pemerintah lebih disukai daripada swasta dan mengakui pandangan persamaan seluruh manusia untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan yang terkandung di dalam Pancasila.

Negara Indonesia sangat kaya dengan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang melimpah, jika bangsa Indonesia dapat mengelola dengan

baik tanpa campur tangan pihak asing. Kemudian hasil yang dicapai untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu untuk dikorupsi. Maka Indonesia akan menjadi negara yang maju tanpa bergantung dengan pihak asing seperti sekarang ini.

Penyusun setuju dengan adanya Pembangunan Lima Tahun dilaksanakan secara bertahap sehingga hasil yang tercapai dan tidak tercapai dapat di lihat dan diperbaiki dari tahun ke tahun. Penulis menyarankan agar pemerintah saat ini atau selanjutnya dapat memperbaiki ekonomi di Indonesia dengan kebijakan yang dilakukan pada masa kekuasaan sebelumnya dengan melakukan perbaikan. Jika kebijakan pemerintah sebelumnya baik dan cocok dilakukan maka dapat diadopsi dengan melakukan perbaikan, dan birokrasi yang ada di pemerintahan melakukan sesuatu harus dengan tulus, tidak memikirkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Jika para pemimpin di Indonesia benar-benar memikirkan nasib rakyat kedepannya maka Indonesia menjadi negara maju dan dapat bersaing di kancha mancanegara.

Oleh karena itu, bagi yang tertarik pada kajian sejarah politik ekonomi pada masa Soeharto tahun 1969-1989, hendaknya dikembangkan cangkupan arah kajiannya, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang diambil dapat lebih berbobot.

Akhirnya, kepada semua pihak, saran dan kritik yang membangun penyusun sangat mengharapkan, sebagai langkah perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Muhammad, Abu abdullah, Sahih al-Bukhari, "*Kitab al-Ahkam*", Kairo: Dar el Fikr, 1981 H, VII: 104.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Al-Mawardi, *al-ahkam as-Sulthaniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Khattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Ali Muhammad Abi Hasan bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, *Al-Ahkam as Sultaniyyah Wa al-Wilayah ad-Dniyyah*, Beirut: Daral-kutub al Ilmiyyah, t.t.

D. Buku-Buku

Abdillah Maskuri, *Demokrasi Dipersimpang Makna; Respon Intelektual Muslim Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Achmad Suhawi, *Gymnastik Politik Nasionalis Radikal Fluktuasi Gerakan*

- Mahasiswa Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ardant H.W, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Ardial, *Komunikasi Politik*, cet II, Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media, 2010.
- ‘Audah Jaser, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Penerjemah: ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Azhary Muhammad Tahir, *Negara Hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Bakri Asfari Jaya, *Konsep maqashid syari’ah menurut al-syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996.
- Baswir Revrison, *Mafia Berkeley*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) V : 1626, artikel “ Siyasah as-Syar’iyyah.
- Dawam Rahardjo M., *Pragmatisme dan Utopia corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, cet.I, Jakarta: LP3S, 1992.
- Djazuli A., *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah”*, cet.1, Bandung: Prenada Media, 2003.
- _____, *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah”*, cet.3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Eric Hiariej, *Materialisme-Sejarah Kejatuhan Soeharto, Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru*, cet. I, Yogyakarta: IRE Press,

2005.

Fattah Eep Saefulloh, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*

Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994.

Fauzi dkk, “*Dalam Riset Utama Membaca Sejarah Pergerakan*”, Tradem, Edisi

Kelima, Yogyakarta, 2003.

Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad Bandung: Pustaka, 1984.

Ghaffar Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, cet. Ke-4

Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004.

Harsutejo, G 30 S, *Sejarah Yang Digelapkan; Tangan Berdarah CIA dan Rejim*

Soeharto, Jakarta: Hasta Mitra, 2003.

Iman Toto K. Raharjo dkk, *Bung Karno; Wacana Konstitusi dan Demokrasi*, cet.I,

Jakarta: PT Grassindo, 2001.

J. Rachbini Didik, *Ekonomi politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Edisi

I, Jakarta: Granit 2004.

Jun Honna, *Serdadu Memburu Hantu: Ideologi Kewaspadaan disenjaka*

Kekuasaan Orde Baru, cet.I, Yogyakarta: CIA ,2006.

Karim M.Rusli, *Negara dan peminggiran Islam Politik*, cet. I, Yogyakarta: Tiara

wacana atas kerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan the Ford

Foundation, 1999.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII, Bandung : Mandar

Maju, 1996.

Khan Qomaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Terj. Anas Wahyudin:

penyunt. Ammar Haryono, cet.I, Bandung: Pustaka, 1983.

- Mas'ood Mohtar. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta:LP3S, 1989.
- _____, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan* cet.III, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mohamad Goenawan, *Catatan Pinggir 5*, Jakarta: PT Temprint, 1995.
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila gagasan dan kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- _____, *Ekonomi rakyat, Program IDT,dan Demokrasi Ekonomi*, cet.I, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Mudzhar M. Antho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Munawir A.Warson, *kamus al-Munawir* Surabaya: Pustaka Progresif 1997.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, cet. Ke 4, Jakarta; Balai Pustaka, 1984.
- Projodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta, 1977.
- Rais M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al Kattani: penyuntingan Euis Erinawati. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ramage Douglas E., *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, cet. ke-1, Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Ricklefs M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, cet ke-II, Jakarta: Serambi, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UII Press, 1986.

Syamsuddin M. Din, *Islam dan politik Era Orde Baru*, cet. I Jakarta: Logos

Wacana Ilmu, 2001.

Uhlen Anders, *Oposisi Berserak*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1998.

E. Karya ilmiah

Pujiyono, *Kebijakan Politik Orde Baru tentang Fusi (penyempitan) Parpol*

Perspektif Hukum Islam. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Warnoto, *Politik Hukum Islam (studi Komaparasi era Orde Lama, Orde Baru dan*

Reformasi). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta (2007).

F. Lainnya/media online

www.definisimu.blogspot.com

www.wikipedia.com

www.hankkuang.wordpress.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB 1			
1	14	20	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka meraka (diputuskan) dengan musyaarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka.
2	14	22	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, mahateliti.
3	15	24	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan.
4	15	26	Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
5	15	27	Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat.
BAB III			

6	70	3	Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku sembahlah Allah dan sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurannya (manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia), karena itu mohonlah ampun kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) yang lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).
7	72	9	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
8	73	11	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
9	74	13	Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dan urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwallah kepada Allah swt. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

BIOGRAFI ULAMA

IBNU TAIMIYAH

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abi Al-halim bin Taimiyah. Lahir di Harran pada tahun 661 hijriyah dan meninggal di penjara pada tahun 729 hijriah. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Ahmad Abdul Halim Bin Abdussalam Ibn Abdullah Bin Taimiyah, seorang syaikh, khatib dan hakim di kotanya. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf ekstrim karena kurang memberi ruang gerak pada akal. Masa hidupnya bersamaan dengan kondisi umat islam yg mengalami disintegrasi, dislokasi sosial, dan dekadensi moral dan akhlak. Kelahirannya lima tahun setelah baghdad dihancurkan pasukan mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan.

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang muhaddits mufassir, faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan luas tentang filsafat. Pemikiran-pemikiran yg dituangkan dalam karya-karyanya memang cukup radikal. Ia berusaha membersihkan masyarakat dari akidah dan kepercayaan yg dianggapnya sesat. Bahkan ia berani mengkritik Khalifah Umar dan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Ia juga menyerang Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Kritiknya juga ditujukan pada kelompok-kelompok agama sehingga membangkitkan kemarahan para ulama sezamannya.

Ibnu Taimiyah menulis fatawa-fatwa dan karangan-karangannya di penjara. Pendapatnya yang mengatakan bahwa ziarah kubur ke makam Nabi-nabi dan orang-orang saleh tidak wajib, bahkan tidak dibenarkan agama mengantarkannya ke penjara di sebuah benteng di damsyik hingga menghembuskan nafasnya yang terakhir. Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah lah yang sampai sekarang ini banyak diadopsi oleh wahabi.

AL-MAWARDI

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri al Syafii. Beliau dilahirkan dikota Basrah, irak pada 364H/974 M. Ketika kebudayaan Islam mencapai masa-masa keemasannya ditengah para khalifah daulah Abbasiyah, masa pendidikan al Mawardi di mulai dengan belajar hadis dan fiqh pada al-hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali. Kemudian ia melanjutkan studinya di kota bagdad di “kampus”al-Zafarani. Di kota peradaban ini al-Mawardi menajamkan disiplin ilmunya di bidang hadis dan fiqh pada seorang guru bernama Abu Hamid Ahmad bin Tohir al-Israyini (wafat pada 466 H).

Disamping sebagai penulis produktif, al-Mawardi adalah seorang Hakim Agung yang berkedudukan di Nisabur, diangkat pada 429 H setelah menjadi

hakim daerah diberbagai wilayah jabatan hakim agung tersebut dipegang sampai wafatnya pada 450 H. Karya al-Mawardi tidak berputar pada satu cabang disiplin saja, karya al-Mawardi yang cukup monumental adalah al-Ahkam al-Sulthoniyah, ini adalah tulisan al-Mawardi yang paling awal diterbitkan dan paling dikenal di dunia Islam.

ABDUL WAHAB KHALLAF

Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung `Uyainah (Najd), lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibukota Arab Saudi sekarang. Beliau meninggal dunia pada 29 Syawal 1206 H (1793 M) dalam usia 92 tahun, setelah mengabdikan diri selama lebih 46 tahun dalam memangku jawatan sebagai menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi . Muhammad bin `Abd al-Wahhāb adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam secara murni.

Syeikh Muhammad bin 'Abdul Wahab berkembang dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Ayahnya adalah ketua jabatan agama setempat. Sedangkan datuknya adalah seorang qadhi (mufti besar), tempat di mana masyarakat Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama. Oleh kerana itu, kita tidaklah hairan apabila kelak beliau juga menjadi seorang ulama besar seperti datuknya. Beliau meninggal dunia pada 29 Syawal 1206 H (1793 M) dalam usia 92 tahun, setelah mengabdikan diri selama lebih 46 tahun dalam memangku jabatan sebagai menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi .

AL MAUDUDI

Abu A'la Al-Maududi lahir di Aurangabad, suatu kota terkenal di daerah Andra Pradesh India, pada tanggal 3 Rajab 1321 H, bertepatan dengan tanggal 25 September 1903 dan wafat pada tanggal 23 September 1979 di salah satu rumah sakit New York Amerika Serikat. Jadi umur al-Maududi Sejak lahir hingga wafatnya adalah 76 tahun. Al-Maududi mendapatkan pendidikan di rumahnya dididik dan diajar langsung oleh ayahnya sendiri. Tahun 1914, pada usia 11 tahun dia memasuki sekolah lanjutan di Madrasah *Fawqaniyah*. Tahun 1917, ketika berumur 14 tahun dia pindah ke Hyderabad di rumah kakaknya dan melanjutkan pendidikan tingginya di *Dar al-Ulum*. Karena ayahnya meninggal, dia pergi ke Delhi dan bekerja di salah satu penerbitan Islam. Setelah ekonominya mantap, dia memperdalam berbagai cabang ilmu agama dibawah bimbingan ulama-ulama. Tahun 1918, ketika berumur 15 tahun dia membantu kakaknya mengasuh majalah Islam al-Madinah disinilah merupakan permulaan karier Al-Maududi sebagai wartawan.

Al-Maududi sejak tahun 1937 hingga tahun 1939 pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada tahun 1937 dia pergi ke Lahore dan bertemu dengan Muhammad Iqbal dan Pada tahun 1938 dia pindah ke Punjab memenuhi tawaran Chandry T. Ali. Di sana dia mendirikan perkampungan yang diberi nama *Dar al-Islam*. Pada Januari 1939 meninggalkan Dar al-Islam, pindah ke Lahore dan menjabat sebagai Dekan Fakultas *Theology PadaIslamic College*. Tahun 1941 pada usia 38 tahun, Al-Maududi bersama-sama dengan tujuh puluh lima pengikutnya, mendirikan organisasi yang diberi nama *Jamiah Islamiyah*, sebuah organisasi yang bergerak di bidang politik yang dipimpinnya sejak tahun 1941 hingga tahun 1971, yaitu lebih kurang 30 tahun. Pada tahun 1953, Al-Maududi dijatuhi hukuman mati Karena tuduhan “subversif” menulis artikel yang dinilai menghasut masyarakat. Namun pun demikian, dia diremisi dengan hukuman seumur hidup dan pada tanggal 28 April 1955 dibebaskan melalui keputusan Mahkamah Agung.

Tanggal 6 Januari 1964 ditahan ketika Jamiah Islamiyah dilarang dibawah rezim Ayub Khan, tanggal 9 Oktober 1964 dibebaskan oleh pengadilan tinggi Punjab, 29 Januari 1967 ditahan kembali oleh Rezim Ayub Khan, karena merayakan Idul Fitri sebelum Ru’yatul Hilal, baru pada tanggal 15 Maret 1967 dibebaskan karena adanya petisi tertulis. 7 Juni 1972 menyelesaikan karyanya Tahfim al-Qur’an yang disusun sejak Februari 1942. Akhirnya pada tanggal 23 September 1979 wafat di salah satu rumah sakit New York Amerika Serikat.

FAZLUR RAHMAN

Fazlur Rahman dilahirkan pada 21 September 1919, di daerah Hazara yang terletak disebelah barat laut Pakistan. Pendidikan dalam keluarga benar-benar efektif dalam membentuk watak kepribadian Fazlur Rahman ketika menghadapi dunia nyata. Pada tahun 1933 Fazlur Rahman di bawa ke Lahore dan memasuki sekolah modern, namun malamnya tetap mendapatkan pelajaran dari ayahnya di rumah. Pada tahun 1940 dia menyelesaikan BA nya dalam bidang bahasa Arab di Universitas Punjab dan dua tahun kemudian dia memperoleh gelar Master dalam bidang yang sama pada Universitas yang sama. Beliau terakhir belajar di *Universitas Oxford*. Beliau juga menguasai simbilan bahasa: Latin, Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab, Persia, dan Urdu. Sebagai bahasanya sendiri si Pakistan.

Fazlur Rahman pada masa pemerintahannya Ayub Khan diangkat menjadi penasehat pemerintah dengan memegang dua jabatan strategis dalam merumuskan warna Islam dalam negara Pakistan, yang pertama sebagai Direktur Pusat Lembaga Riset Islam dan kedua sebagai anggota badan Penasehat Ideologi.

SOEKARNO

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai tiga istri dan dikaruniai delapan anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika..

Beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya MPR mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kesehatan terburuk, yang pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah menganugerahkannya sebagai “Pahlawan Proklamasi”.

SOEHARTO

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah. Soeharto masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani. Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombang, Jawa Tengah pada tahun 1941.

Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran. Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel. Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).

Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.

Presiden RI Kedua HM Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional, itu meninggal dalam usia 87 tahun setelah dirawat selama 24 hari (sejak 4 sampai 27 Januari 2008) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

1969-1989

(Persen)

No	Tahun	Laju Inflasi
1	1966	650,0
2	1967	120,0
3	1968	85,0
4	1969	10,0
5	1970	8,9
6	1971	2,5
7	1972	25,8
8	1973	27,3
9	1974	33,3
10	1975	19,7
11	1976	14,2
12	1977	11,8
13	1978	6,7
14	1979	21,8
15	1980	16,0
16	1981	7,1
17	1982	9,7
18	1983	11,5

19	1984	8,8
20	1985	4,3
21	1986	8,8
22	1987	8,9
23	1988	5,5
24	1989	6,0

Sumber: Biro Pusat Statistik¹

Sebelum Pemerintahan Orde Baru laju inflasi di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 1966 tercatat 650 persen, tahun 1967 sebesar 120 persen, kemudian pada tahun 1968 berhasil dikurangi menjadi 85 persen. Dimulai tahun 1969 (awal PELITA I) dan seterusnya laju inflasi berhasil dikendalikan secara menakutkan, bahkan dibawah 10 persen (satu digit) sejak tahun 1984 sampai dengan 1989.²

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

1969-1989

(Persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
1969	7,1	1980	9,9
1970	7,5	1981	7,9

¹ Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, *Orde Baru dalam angka (1969-1991) hasil-hasil pembangunan jangka panjang tahap pertama*, (Jakarta: DPP Golkar, 1992), hlm. 12.

² *Ibid.*

1971	7,0	1982	2,2
1972	9,4	1983	4,2
1973	11,3	1984	7,0
1974	7,6	1985	2,5
1975	5,0	1986	5,9
1976	6,9	1987	4,9
1977	8,8	1988	5,8
1978	7,8	1989	7,5
1979	6,3		

Sumber: Biro Pusat Statistik³

Pertumbuhan ekonomi selama Orde Baru meningkat secara rata-rata sebesar 6,8 persen pertahun. Laju pertumbuhan ini adalah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi rata-rata yang ditetapkan di setiap PELITA yaitu sebesar 5 persen.⁴

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

1969-1989

(Persen)

No	Tahun	Penduduk Miskin
1	1976	54,2
2	1978	47,2

³ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴ *Ibid.*

3	1980	42,3
4	1981	40,6
5	1984	35,0
6	1987	30,0
7	1990	27,2

Sumber: Biro Pusat Statistik⁵

Akibat keberhasilan pembangunan di segala bidang, penduduk yang masih miskin telah berkurang secara drastis dari sebanyak 54,2 juta orang atau 40,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1976 menjadi tinggal sebanyak 27,2 juta orang atau 15,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1990.⁶

HASIL PENGENTASAN KELUARGA MISKIN

(1969-1989)

No	Satuan	Pembangunan Lima Tahun (PELITA)			
		I	II	III	IV
1	Keluarga	0	23343	265542	405022

Catatan : Angka Kumulatif

Sumber : Departemen Sosial⁷

Pengentasan keluarga miskin yang diberi oleh Pemerintah dimulai pada Pelita II dengan jumlah 23343 keluarga. Jumlah ini kemudian meningkat pada tahap berikutnya, pada tahun ke 2 Pelita IV keseluruhannya menjadi 405022 keluarga.⁸

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 160.

⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

CURICULUM VITAE

Nama : Eni Martaningrum

Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 27 November 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Krapyak RT 002/RW 001, Paremono, Mungkid,
Magelang

Alamat di Yogyakarta : -

Nama Orang tua :

Ayah : Teguh Ruswanto

Ibu : Sukirni

Alamat : Krapyak RT 002/RW 001, Paremono, Mungkid,
Magelang

Riwayat Pendidikan :

SD Munjul Jaya Purwakarta : 1997 – 2003

SMP Negeri 1 Mungkid : 2003 – 2006

SMA Negeri 1 Kota Mungkid : 2006 – 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009 sampai sekarang